

**PERANAN NOTARIS DALAM PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS (ANALISIS
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR
425/PDT.P/2007/PN.JKT.BAR.PERSEROAN)**

TESIS

E. PARAMITHA SAPARDAN

0706177450



**FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
JULI 2009**

**PERANAN NOTARIS DALAM PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS (ANALISIS
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR
425/PDT.P/2007/PN.JKT.BAR.PERSEROAN)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

E. PARAMITHA SAPARDAN

0706177450



**FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

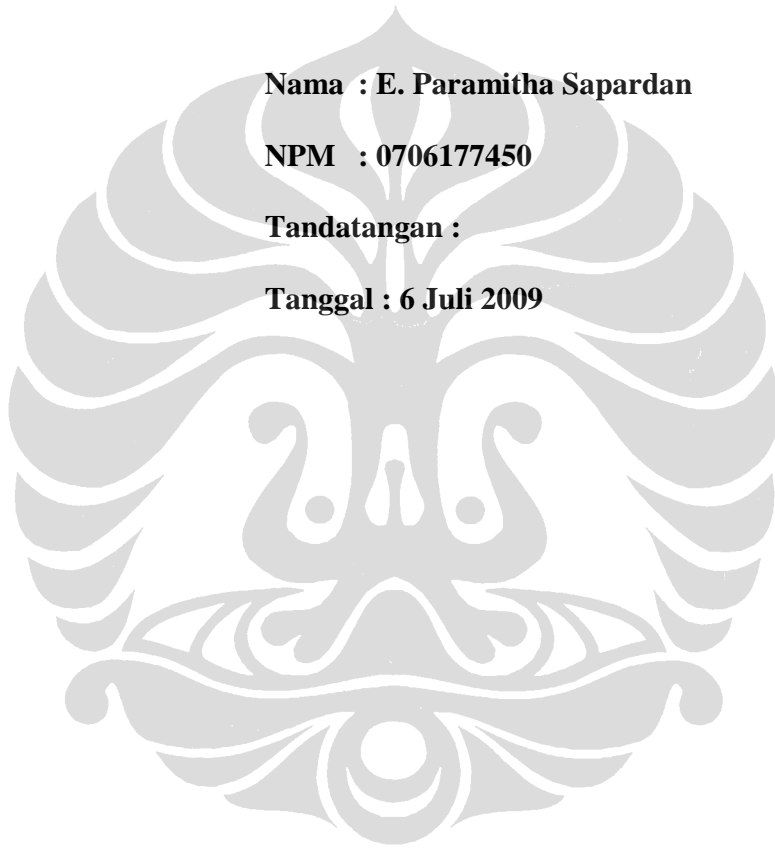
**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip
maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : E. Paramitha Sapardan

NPM : 0706177450

Tandatangan :

Tanggal : 6 Juli 2009



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : E. Paramitha Sapardan
NPM : 0706177450
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Peranan Notaris Dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseoran Terbatas (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 425/PDT.P/2007/PN.JKT.BAR.PERSEROAN)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Notariat Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Fathiah Helmi, S.H.

()

Penguji : Prahasto W Pamungkas, S.H., LL.M

()

Penguji : Ismala Dewi S.H., M.H.

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 14 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terimakasih kepada:

- (1) ibu Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
 - (2) orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan moral;
 - (3) rekan-rekan Magister Kenotariatan angkatan 2007 yang telah memberikan semangat dan informasi dalam penyusunan tesis ini;
 - (4) Risen Yan Piter, yang telah menjadi rekan diskusi dalam penyusunan tesis ini.
- Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 6 Juli 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : E. Paramitha Sapardan
NPM : 0706177450
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Fakultas Hukum
Jenis Karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Peranan Notaris Dalam Tindakan Pengambilalihan Saham Perseroan Secara Langsung Dari Pemegang Saham

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok
Pada Tanggal : 6 Juli 2009
Yang Menyatakan

(E. Paramitha Sapardan)

ABSTRAK

Nama : E Paramitha Sapardan S.H.

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul :

Peranan Notaris Dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 425/PDT.P/2007/PN.JKT.BAR.PERSEROAN)

RUPS merupakan salah satu Organ dalam Perseroan Terbatas. Dlaam suatu tindakan hukum tertentu, Perseroan memerlukan persetujuan RUPSLB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 425/PDT.P/2007/PN.JKT.BAR. SD selaku Direktur utama PT PJM dan pemilik 40% saham perseroan ingin mengalihkan sahamnya, sehingga untuk proses ini harus dilakukan melalui prosedur RUPSLB. Beberapa RUPSLB yang telah dilakukan tidak memenuhi kuorum sehingga tidak dapat dilaksanakan dan mengambil keputusan, hingga pada sebelum dilaksanakannya RUPSLB terakhir, Perseroan sudah melakukan permohonan penetapan kuorum sehubungan dengan RUPSLB tersebut ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam permohonan pemohon, pemohon mengajukan beberapa alasan yang menjadi dasar permohonannya sehubungan dengan RUPSLB tersebut, dan pada putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan seluruh permohonan pemohon. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan cara mengkaji berbagai literatur seperti buku-buku cetak, dan turunan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dimaksud. Terhadap kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 425/PDT.P/2007/PN.JKT.BAR, dilakukan penelitian terhadap beberapa hal, yakni apakah alasan permohonan pemohon sah untuk mengajukan penetapan pengadilan RUPSLB ketiga ke Pengadilan Negeri, dan apakah notaris dapat hadir dan membuat berita acara RUPS berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon melampaui dari apa yang ditetapkan sehingga, dalam proses permohonan pengadilan tidak dapat menetapkan hal-hal diluar kewenangan yang diatur dalam UUPT, dan terhadap notaris yang hadir dalam RUPSLB tersebut maka notaris memiliki wewenang untuk memberikan penyuluhan hukum dan notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil dari akta tersebut, bukan atas kebenaran materilnya

Kata Kunci:

Peran Notaris, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Penetapan Pengadilan Negeri

ABSTRACT

Name : E. Paramitha Sapardan S.H.

Study Program : Magister Kenotariatan

Title :

The Role of a Notary in Extraordinary General Meeting Of Shareholders (West Jakarta District Court's Order Number 425/PDT.P/2007/PN.JKT.BAR.PERSEROAN Analysis)

General Meeting Of Shareholder are one of three limited liability company organs. On several particular legal pretence, the company require the general meeting of shareholders consent based on law number 40 of 2007. The west Jakarta District Court's order (Penetapan Pengadilan) case number 425/PDT.P/2007/PN.JKY.BAR.PERSEROAN, Mr. SD as the president director of PJM Company and as the owner of 40% of share in the company desire to sell his share, therefore it require an extraordinary general meeting of shareholders procedure. The remain proceeding extraordinary general meeting of shareholders does not meet the quorum, hence it does not adopting resolutions. Moreover, before the previous general meeting of shareholders adjourn, the company submit a proposal to west Jakarta District Court regarding the general meeting of shareholders quorum court's order. The applicant subjected a number of proposals along with the court complete granted. This research is normative juridiche based on library research methodology, conducted by way of reviewing literatures which have no limitation in time and place, including book research results, laws and regulations either printed or online which related to the research. The research set two main predicament based on The west Jakarta District Court's order case. There are, the legitimacy of applicant proposal regarding to the extraordinary general meeting of shareholder quorum court's order, and the role of notary to be present at the extraordinary general meeting of shareholders in order to form a minutes based on west Jakarta district court's order (Penetapan Pengadilan). In summary, court is not allowed to granted a proposal in which not constitute on the law, hence notary has the authority to provide a legal advice and has the responsible no more than the formality form of the deeds.

Key Words:

The Role of Notary, General Meeting Of Shareholder, Court's Order

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	9
1.3 Metode Penelitian.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
2.PERANAN NOTARIS DALAM PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS (ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR 425/PDT.P/2007/PN.JKT.BAR.PERSEROAN).....	13
2.1 Bentuk-bentuk Badan usaha.....	13
2.2 Badan Usaha Di Indonesia.....	14
2.3 Sejarah Perseroan Terbatas.....	15
2.3.1 Awal Terjadinya Perseroan Terbatas.....	16
2.3.2 Peraturan Mengenai Perseroan Terbatas.....	17
2.3.3 Kewenangan Pengadilan Dalam Perseroan.....	21
2.3.3.1 Badan Peradilan Di Indonesia.....	21
2.3.3.2 Pengertian Permohonan dan Gugatan.....	22
2.4 Macam-macam Perseroan Terbatas.....	23
2.5 Organ Perseroan Terbatas.....	24
2.5.1 Rapat Umum Pemegang Saham.....	24
2.5.2 Direksi.....	35
2.5.3 Dewan Komisaris.....	46
2.6 Peran dan Tanggung Jawab Notaris.....	54
2.6.1 Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	54
2.6.2 Jabatan Notaris.....	56
2.6.3 Nilai Pembuktian Akta Notaris.....	58
2.6.4 Akta Notaris.....	61
2.6.5 Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Otentik.....	62
2.6.6 Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris.....	66
2.6.6.1 Kewenangan Notaris.....	66
2.6.6.2 Kewajiban Notaris.....	67
2.6.6.3 Larangan Notaris.....	70
2.6.7 Asas Praduga Sah Dalam Menilai Akta Notaris.....	71
2.6.8 Implementasi Menghadap dikaitkan dengan Pasal 77 ayat (1) UUPD.....	74

2.6.9 Minuta Akta dan dokumentasi elektronik.....	78
2.7 Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Mengenai Keputusan RUPS Ketiga PT PJM Nomor 425/PDT.P/2007/PN.JKT.BAR.....	80
2.7.1 Latar Belakang PT PJM.....	80
2.7.2 Kegiatan Penyelenggaraan RUPSLB PT PJM.....	81
2.7.3 Anggaran Dasar PT PJM.....	83
2.7.4 Permohonan Penyelenggaraan RUPS-3 Yang Diajukan Oleh Perseroan.....	84
2.7.5 Kewenangan Pengadilan Negeri Sehubungan Dengan Penyelenggaraan RUPS.....	86
2.7.6 Analisa Kasus Penetapan RUPSLB PT PJM oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat.....	87
3. PENUTUP.....	88
3.1 Kesimpulan.....	88
3.2 Saran.....	89
Lampiran.....	

